

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF POSITION STATED OWNED ENTERPRISES AS A LEGAL INDEPENDENT ENTITY AND THE RESPONSIBILITIES IN THE MANAGEMENT OF STATED OWNED ENTERPRISES ASSETS ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 40 OF 2007 ABOUT THE LIMITED LIABILITIES COMPANY AND LAW NUMBER 19 OF 2003 ABOUT THE STATED OWNED ENTERPRISES

Chyntia Christie

(1187004)

Limited Stated Owned Enterprises as one pillar of the country's economy should have a clear position. Stated Owned Enterprises positions itself oftentimes is not clear because it's capital originating are from the state but unfortunately it always be accused as an independent legal entity. This has led to some variety of errors on many sides. The legal entity status which resulting vagueness of the responsibilities of the parties and organs of the company's founder from responsibility for the management of property assets of Limited Stated Owned Enterprises.

Author used a method called the study of normative law to do this research because this research was done by reviewing secondary data. This normative research including study of legal literature, which is done by tracing the principles of law processed based on some existing rules and tested based on the principles of common law.

The position of the Stated Owned Enterprises as an independent legal entity in which it's assets are apart from it's founder. It is accordance with Article 3 of law number 40 of 2007 about limited liabilities company that the state as the shareholders of the company are liable over shares of the company they owned. Stated Owned Enterprises asset management is the responsibility from the organ of the limited liabilities company. The organ of the limited liability company in managing asset the state which is not being detached from the principle of good corporate governance, articles of association of Stated Owned Enterprises and also applicable regulations.

Keywords: Limited Liability Company, Stated Owned Enterprises, and Good Corporate Government

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BUMN SEBAGAI ENTITAS MANDIRI
BADAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN
ASET KEKAYAAN BUMN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA
MILIK NEGARA

Chyntia Christie
(1187004)

Persero BUMN sebagai salah satu penopang ekonomi Negara seharusnya memiliki kedudukan yang jelas. Persero BUMN seringkali tidak jelas kedudukannya karena modal yang berasal dari Negara namun dituntut sebagai badan hukum mandiri. Hal ini mengakibatkan berbagai kekeliruan pada banyak pihak. Ketidakjelasan status badan hukum mengakibatkan ketidakjelasan akan tanggung jawab dari pihak-pihak pendiri dan organ perseroan akan tanggung jawab atas pengelolaan aset kekayaan Persero BUMN.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian di proses terhadap aturan yang ada dan diuji berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum.

Kedudukan Persero BUMN yaitu sebagai entitas mandiri badan hukum yang harta kekayaannya terpisah dari pendirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Negara sebagai pemegang saham perseroan bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya atas Perseroan. Pengelolaan aset kekayaan BUMN merupakan tanggung jawab dari organ Perseroan. Organ Perseroan dalam mengelola aset kekayaan Negara tidak terlepas dari prinsip *good corporate governance*, Anggaran Dasar BUMN, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perseroan, BUMN, dan *Good Corporate Government*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BADAN HUKUM DAN	25
BADAN USAHA MILIK NEGARA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Badan Hukum	25
B. Badan Usaha	27
C. Jenis-Jenis Badan Hukum	30

D. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	40
E. Modal BUMN	45
F. Pengurusan dan Pengawasan	46
G. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara	50
H. BUMN Sebagai Kesatuan Yuridis	61
BAB III TINJAUAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB	65
PENGELOLAAN ASET KEKAYAAN BUMN DIKAITKAN	
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007	
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN UNDANG-	
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA	
MILIK NEGARA	
A. Tinjauan Mengenai Kedudukan Pemerintah Sebagai <i>Stakeholder</i>	65
Utama atas BumN yang Merupakan Entitas Mandiri Badan Hukum	
B. Tinjauan Mengenai Pengelolaan Aset BUMN	68
C. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Pengurus BUMN dalam	73
Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN	
BAB IV ANALISA TERHADAP KEDUDUKAN BUMN SEBAGAI	80
ENTITAS MANDIRI BADAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB	
PENGELOLAAN ASET KEKAYAAN BUMN DIKAITKAN	
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007	
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN UNDANG-	
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA	
MILIK NEGARA	

A. BUMN sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum yang Terpisah dari Negara	80
B. Tanggung Jawab Pendiri dan Organ Perseroan Atas Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN	85
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN (Curriculum Vitae)	118